



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 100.3.1.2/29 TAHUN 2026

TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
TAHUN 2026

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: a. bahwa guna tertib pelaksanaan penyusunan Peraturan Bupati Pekalongan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 14 ayat (7) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu ditetapkan Program Penyusunan Peraturan Bupati Pekalongan Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Penyusunan Peraturan Bupati Pekalongan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 79);
7. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Program Penyusunan Peraturan Bupati Pekalongan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Program Penyusunan Peraturan Bupati Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Program Penyusunan Peraturan Bupati Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setelah ditetapkan dapat dilakukan penambahan atau pengurangan dengan terlebih dahulu mengajukan Nota Dinas sebagai penjelasan dan pertimbangan kebijakan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap triwulan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan.
- KELIMA : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 6 Januari 2026

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Tembusan; disampaikan kepada, Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan
2. Sekretaris Daerah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda;
4. Inspektur;
5. Kepala Bagian Hukum Setda;
6. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

Lampiran Keputusan Bupati Pekalongan
 Nomor : 100.3.1.2/29 Tahun 2026
 Tanggal : 6 Januari 2026

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
 TAHUN 2026

NO.	JUDUL	UNIT/PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
1.	Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah KAJEN	RSUD KAJEN
2.	Detail Rincian Objek Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah KAJEN	RSUD KAJEN
3.	Perubahan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah KAJEN	RSUD KAJEN
4.	Detail Rincian Objek Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton	RSUD KRATON
5.	Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton	RSUD KRATON
6.	Remunerasi pada BLUD Kabupaten Pekalongan	DINAS KESEHATAN, RSUD KRATON, RSUD KAJEN DAN RSUD KESESI
7.	Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi pada BLUD RSUD Kabupaten Pekalongan	RSUD KRATON, RSUD KAJEN DAN RSUD KESESI
8.	Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Permohonan Rencana Strategi Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD pada RSUD	RSUD KRATON, RSUD KAJEN DAN RSUD KESESI
9.	Pedoman Pencegahan Konflik Kepentingan Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Pekalongan	BAGIAN PBJ SETDA
10.	Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan	BAGIAN PBJ SETDA
11.	Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	DINPERINDAG
12.	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025	BPKD
13.	Penjabaran Perubahan APBD TA 2026	BPKD
14.	Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026	BPKD
15.	Analisa Standar Belanja	BPKD

NO.	JUDUL	UNIT/PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
16.	Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketigabelas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026	BPKD
17.	Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2027	BPKD
18.	Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu	BPKD
19.	Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	BPKD
20.	Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemberian Pengurangan Keringanan dan Penghapusan Pajak Daerah Beserta Sanksi Administrasinya	BPKD
21.	Besaran Nilai Perolehan Air Tanah	BPKD
22.	Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2027	DINAS PMD
23.	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pekalongan Tahun 2027	DINAS PMD
24.	Pembinaan dan Pengembangan BUMDes	DINAS PMD
25.	Standar Pelayanan Minimal Desa	DINAS PMD
26.	Batas Desa	DINAS PMD
27.	Standar Harga Satuan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2027	DINAS PMD
28.	Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	DINAS PERKIM DAN LH
29.	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Sosial Kerjasama Perbaikan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Kabupaten Pekalongan	DINAS PERKIM DAN LH
30.	Rencana Induk Pengelolaan Sampah	DINAS PERKIM DAN LH
31.	Desa Mandiri Sampah	DINAS PERKIM DAN LH
32.	Persyaratan Teknis dan Standar Prasarana Sarana di TPS 3R	DINAS PERKIM DAN LH
33.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pengarusutamaan Gender	DINAS P3A DAN PPKB

NO.	JUDUL	UNIT/PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
34.	Peta Jalan Kependudukan	DINAS P3A DAN PPKB
35.	Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak	DINAS P3A DAN PPKB
36.	Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak	DINAS P3A DAN PPKB
37.	Organ dan Kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Kaji	BAGIAN PEREKONOMIAN
38.	Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Perumda Air Minum Tirta Kaji	BAGIAN PEREKONOMIAN
39.	Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	DINDUKCAPIL
40.	Pendaftaran Penduduk Non Permanen	DINDUKCAPIL
41.	Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Pekalongan	DINKOMINFO
42.	Pedoman Penyelenggaraan Persediaan Untuk Pengamanan Informasi Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan	DINKOMINFO
43.	Tarif Siaran Iklan Radio Kota Santri	DINKOMINFO
44.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Pendeleasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Dan Nonperizinan Kepada kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan	DINAS PM PTSP
45.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 114 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Berusaha dan Dan non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DINAS PM PTSP
46.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 115 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Berusaha dan Dan non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DINAS PM PTSP
47.	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Pekalongan	DINAS PM PTSP
48.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2027	BAPPERIDA
49.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2026	BAPPERIDA
50.	Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2027	BAPPERIDA

NO.	JUDUL	UNIT/PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
51.	Rencana Aksi daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2026 - 2029	BAPPERIDA
52.	Rencana aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2026-2029	BAPPERIDA
53.	Penyelenggaraan Inovasi Daerah	BAPPERIDA
54.	Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan Tahun 2026	INSPEKTORAT
55.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Pekalongan	INSPEKTORAT
56.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.	BAGIAN ORGANISASI
57.	Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan	BAGIAN ORGANISASI
58.	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	BAGIAN ORGANISASI
59.	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan	BAGIAN ORGANISASI
60.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan	BAGIAN ORGANISASI
61.	Road Map Reformasi Birokrasi	BAGIAN ORGANISASI
62.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah	BAGIAN ORGANISASI
63.	Hari Kerja dan Jam Kerja	BAGIAN ORGANISASI
64.	Rencana Kontijensi Bencana Banjir Daerah	BPBD
65.	Rencana Denah Tata Ruang Kecamatan Siwalan	DPU TARU
66.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	BAKESBANGPOL
67.	Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif	DINPORAPAR

NO.	JUDUL	UNIT/PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
68.	Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kepemudaan	DINPORAPAR
69.	Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Desa Wisata	DINPORAPAR
70.	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelaksanaan Perda Nomor 10 tahun 2024	SATPOL PP DAN DAMKAR
71.	Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP DAN DAMKAR
72.	Tunjangan Resiko Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pekalongan	SATPOL PP DAN DAMKAR
73.	Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberdayaa dan Pengembangan Usaha Mikro	DINKOP UKM DAN NAKER
74.	Penyelenggaraan Parkir Kabupaten Pekalongan	DINAS PERHUBUNGAN
75.	Kawasan Tertib Lalu Lintas	DINAS PERHUBUNGAN
76.	Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Pekalongan Tahun 2026 – 2030	DINAS PERHUBUNGAN
77.	Pedoman Penggunaan Arsip Tertutup	DINAS ARPUS
78.	Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren	DINDIKBUD DAN BAGIAN KESRA
79.	Penanggulangan dan Pemeliharaan Malaria di Daerah	DINAS KESEHATAN

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009